

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG
TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK**

TESIS



Oleh

RENY WEILAND LUMBAN TOBING

(2102190085)

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN APARATUR
SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

RENY WEILAND LUMBAN TOBING

(2102190085)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENY WEILAND LUMBANTOBING

NIM : 2102190085

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ”**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 30 Juni 2025



RENY W. LUMBAN TOBING
NIM: 2102190085



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN
NARKOBA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK ”**

Oleh:

Nama : RENY WEILAND LUMBANTOBING

NIM : 2102190085

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 30 Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S
NIP/NIDK: 191691/9990463325

Pembimbing II

Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H
NIDK: 8953011024

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/ 0305097105

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/ 0320116402



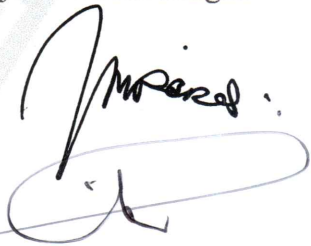
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 30 Juni 2025 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Reny Weiland Lumbantobing
NIM : 2102190085
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Fernando Silalahi., S.T., S.H., M.H., CLA.	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Reny Weiland Lumbantobing

NIM : 2102190085

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **“EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PENANGANAN APARATUR SIPIL
NEGARA YANG TERLIBAT
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK ”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2025



RENY W. LUMBANTOBING

NIM: 2102190085

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadheta Nadeak, M.Pd., PA. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi S.H., M.H., Selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini
6. Bapak Dr. Fernando Silalahi., S.T., S.H., M.H., CLA., selaku Dosen Penguji.
7. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungan nya selama penulis melakukan penelitian ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan.

Jakarta, 30 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Metode Pendekatan	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Teknik Analisis Data.....	21
H. Orisinalitas Penelitian	22
I. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Teori-Teori.....	25

1. Teori <i>Good Corporate Governance</i>	25
2. Teori Kemanfaatan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkoba	28
1. Pengertian Narkoba	28
2. Pengertian Tindak Pidana Narkoba	34
3. Subjek Tindak Pidana Narkoba	34
4. Jenis-Jenis Pengguna Narkoba	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkoba.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	39
E. Tinjauan Umum Tentang Apartur Sipil Negara dan Pegawai Negeri Sipil.....	43
BAB III KENDALA DAN REKOMENDASI DALAM IMPLEMENTASI	
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN MASALAH	
NARKOBA PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL	49
A. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan	49
B. Analisis faktor penghambat berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	65
C. Upaya dan rekomendasi untuk mengatasi Kendala	74
BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN	
MASALAH PENGGUNAAN NARKOBA PADA PEGAWAI	
NEGERI SIPIL.....	78
A. Kebijakan Pemerintah	78
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112

ABSTRAK

Judul: Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Penyalahgunaan narkoba oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan persoalan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip etika profesi, moralitas publik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam penanganan ASN yang terlibat penyalahgunaan narkoba berdasarkan prinsip AUPB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan sanksi terhadap ASN yang terlibat narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Surat Edaran Menpan-RB Nomor 9 Tahun 2022. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, baik dari segi disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan internal, ketidaksinkronan antara sanksi pidana dan administratif, serta peran yang belum optimal dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi kebijakan dan penguatan sistem pengawasan ASN berbasis meritokrasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat integritas ASN dan menjaga wibawa birokrasi pemerintahan.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Aparatur Sipil Negara, Penyalahgunaan Narkoba, Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Sanksi Administratif, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

Title : Evaluation of Government Policy in Handling Civil Servants Involved in Drug Abuse Based on General Principles of Good Governance

Drug abuse by State Civil Apparatus (ASN) is a serious problem that not only violates criminal law norms, but also violates the principles of professional ethics, public morality, and general principles of good governance (AUPB). This thesis aims to evaluate government policies in handling ASN involved in drug abuse based on the AUPB principles. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Data sources are obtained from primary legal materials in the form of related laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of literature, journals, and legal doctrines.

The results of the study show that normatively, the regulation of sanctions against ASN involved in drugs has been regulated in Law Number 5 of 2014 concerning ASN, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and Circular Letter of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 9 of 2022. However, in its implementation there are still various obstacles, both in terms of regulatory disharmony, weak internal supervision, lack of synchronization between criminal and administrative sanctions, and the less than optimal role of the personnel development officer (PPK). Therefore, there needs to be harmonization of policies and strengthening of the ASN supervision system based on meritocracy, accountability, and legal certainty. This evaluation is expected to be a strategic recommendation for policy makers in strengthening the integrity of ASN and maintaining the authority of the government bureaucracy..

Keywords: *Policy Evaluation, State Civil Apparatus, Drug Abuse, General Principles of Good Governance, Administrative Sanctions, Criminal Sanctions.*